

# Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Kelompok Tani Puring Sari di Arang Limbung

Yoga Pratama<sup>1</sup>, Abdun Nashir Azzam<sup>2</sup>, Muhammad Ghazi Al-Ghiffari<sup>3</sup>, Muna<sup>4</sup>,  
Nur Hikmah<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Tanjungpura

## **Histori Naskah**

Diserahkan:  
08-05-2025

Direvisi:  
09-03-2026

Diterima:  
14-04-2026

## **ABSTRACT**

*The agricultural sector plays an essential role in sustaining national food security, providing employment, and driving the rural economy in Indonesia. This research aims to comprehensively analyze the impact of government policies on the productivity, welfare levels, and various structural and operational challenges faced by the Puring Sari Farmer Group in Arang Limbung Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Utilizing a qualitative approach with a descriptive analytical method, primary data collection was conducted through in-depth interviews using a purposive sampling technique targeting the Head of the Farmer Group, farmer members, and the Arang Limbung Village Head, combined with participatory field observations on the peatlands managed by the community. The findings indicate that government policy interventions in the upstream sector yield significant positive impacts, particularly through the distribution of production facilities such as SNI-standardized subsidized fertilizers and free pesticide assistance. This aid is distributed structurally through the guidance of Agricultural Extension Officers (PPL) and the e-RDCK system, which has proven highly effective in drastically reducing variable production costs and is categorized as well-targeted. Nevertheless, the macro-effectiveness of these policies is substantially diminished by various constraints at the cultivation and post-harvest levels. Key challenges include: (1) the severe lack of modern agricultural machinery, wherein the group only possesses a single rice thresher (power thresher) inherited from three administrative periods ago; (2) limited access to formal capital (financial inclusion) that causes farmers to fail in accessing programs like the People's Business Credit (KUR) and forces them to rely on personal funds or high-interest loans from loan sharks; (3) bureaucratic communication barriers with the central government, tangibly represented by the cancellation of a strategic meeting between farmer representatives and the Minister of Agriculture; (4) the destructive impacts of extreme climate change and annual flooding that damage lands without concrete micro-land mitigation from the government; and (5) the instability of commodity selling prices during peak harvest seasons, which fall into the hands of middlemen due to weak market regulation interventions and rigid absorption standards. As an effort to improve policy effectiveness in the future, this study recommends comprehensive strategies that include the need for equitable distribution of modern infrastructure aid, the opening and simplification of capital access such as KUR without burdensome physical collateral, the initiation of strategic collaboration with the private sector through the utilization of Corporate Social Responsibility (CSR), and the establishment and enforcement of fair base prices to protect farmers' profit margins.*

**Keywords** : Agricultural Policy, Farmer Group, Food Security, Capital Access, Middlemen, Peatlands

## ABSTRAK

Sektor pertanian memegang peranan esensial dalam menopang ketahanan pangan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, tingkat kesejahteraan, serta ragam tantangan struktural dan operasional yang dihadapi oleh Kelompok Tani Puring Sari di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui teknik wawancara mendalam secara purposive sampling terhadap Ketua Kelompok Tani, anggota petani, dan Kepala Desa Arang Limbung, yang dikombinasikan dengan observasi lapangan secara partisipatif pada lahan gambut yang dikelola oleh masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan pemerintah di sektor hulu membawa dampak positif yang signifikan, terutama melalui penyaluran sarana produksi berupa pupuk bersubsidi berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bantuan pestisida gratis. Bantuan ini disalurkan secara terstruktur melalui pendampingan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan sistem e-RDCK, yang terbukti sangat membantu menekan biaya variabel produksi secara drastis dan dikategorikan tepat sasaran. Meskipun demikian, efektivitas makro dari kebijakan tersebut tereduksi secara substansial oleh berbagai kendala di tingkat budidaya hingga pascapanen. Kendala utama mencakup: (1) minimnya ketersediaan alat pertanian modern, di mana kelompok ini hanya memiliki satu unit mesin perontok padi (power thresher) yang merupakan peninggalan dari tiga periode pemerintahan sebelumnya; (2) keterbatasan akses terhadap permodalan formal (inklusi keuangan) yang membuat petani gagal mengakses program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terpaksa mengandalkan dana pribadi atau pinjaman dari rentenir dengan suku bunga tinggi; (3) hambatan komunikasi birokratis dengan pemerintah pusat, yang secara nyata direpresentasikan oleh insiden batalnya pertemuan strategis antara perwakilan petani dengan Menteri Pertanian; (4) dampak destruktif dari perubahan iklim ekstrem dan banjir tahunan yang merusak lahan tanpa adanya mitigasi lahan mikro yang konkret dari pemerintah; serta (5) ketidakstabilan harga jual komoditas saat panen raya yang jatuh ke tangan tengkulak akibat lemahnya intervensi regulasi tata niaga pasar dan standar serapan yang kaku. Sebagai upaya peningkatan efektivitas kebijakan di masa depan, penelitian ini merekomendasikan strategi komprehensif yang meliputi perlunya pemerataan distribusi bantuan sarana prasarana modern, pembukaan dan simplifikasi akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan fisik yang memberatkan, inisiasi kolaborasi strategis dengan sektor swasta melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta penetapan dan penegakan harga dasar yang berkeadilan guna melindungi margin keuntungan petani.

**Kata Kunci** : Kebijakan Pertanian, Kelompok Tani, Ketahanan Pangan, Akses Modal, Tengkulak, Lahan Gambut

**Corresponding Author** : Abdun Nashir Azzam, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat Indonesia, e-mail: nashirazzam04@gmail.com



## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan pilar fundamental dan tulang punggung dalam struktur perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara makroekonomi, sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan pokok untuk memfasilitasi kebutuhan lebih dari 270 juta jiwa penduduk, tetapi juga memegang peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya di wilayah pedesaan, (Hidayah et al., 2022; Safitri et al., 2025) Dalam diskursus pembangunan ekonomi berkelanjutan, peran strategis sektor pertanian tidak dapat dilepaskan dari konsep ketahanan pangan (*food security*) dan pengentasan kemiskinan struktural. Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani gurem berbanding lurus dengan sejauh mana negara mampu mengorkestrasi kebijakan afirmatif yang melindungi mereka dari guncangan pasar dan kerentanan lingkungan. Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai regulator dan fasilitator, terus meluncurkan berbagai instrumen kebijakan mulai dari subsidi sarana produksi, penyediaan infrastruktur irigasi, bantuan alat mekanisasi, hingga stabilisasi harga komoditas guna memastikan bahwa entitas agraris dapat memproduksi secara berkesinambungan dan memperoleh taraf hidup yang layak, (Achmad Suryana et al., 2021; Hariyoko, 2013)

Namun demikian, realitas sosiologis dan ekonomis di lapangan sering kali memperlihatkan adanya disonansi antara formulasi kebijakan di tingkat pemerintahan pusat dengan implementasi aktualnya di tingkat akar rumput. Pada dekade terakhir, sektor pertanian dihadapkan pada ancaman multidimensional yang eksponensial dan semakin kompleks. Tantangan utama yang paling mendesak dewasa ini adalah anomali cuaca akibat perubahan iklim global (*climate change*), yang memicu pergeseran kalender musim tanam, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis seperti banjir rob dan kekeringan panjang, serta ledakan resistensi hama dan penyakit tanaman yang sulit diprediksi. Di luar ancaman ekologis yang masif tersebut, para petani pedesaan juga masih terbelenggu oleh hambatan sosio-ekonomi klasik yang berurat akar. Kendala ini mencakup keterbatasan akses terhadap permodalan perbankan yang formal, di mana skema pembiayaan kerap kali mensyaratkan agunan yang tidak mampu dipenuhi oleh petani kecil. Selain itu, defisit akses terhadap teknologi dan mekanisasi pertanian mutakhir menyebabkan kegiatan usaha tani berjalan secara tidak efisien, padat karya, dan rentan terhadap tingginya angka susut hasil (*yield loss*) pascapanen, (Anggraini, 2025). Modernisasi pertanian yang dicita-citakan pemerintah sering kali terkendala oleh asimetri distribusi, sehingga masih banyak kelompok tani yang tertinggal dalam mengadopsi inovasi teknologi tepat guna.

Konteks spasial dari dinamika dan probematika pertanian ini tercermin secara empiris dan sangat nyata di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis dan topografis, Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh lanskap dataran rendah dan ekosistem lahan gambut (*peatland*) yang memiliki karakteristik biofisik yang sangat unik sekaligus menantang bagi praktik budidaya pertanian. Lahan gambut di wilayah ini diketahui secara ekstensif memiliki tingkat kesuburan alami yang tergolong rendah, ditandai dengan tingkat kemasaman (pH) tanah yang sangat tinggi, serta defisiensi unsur hara makro dan mikro yang esensial seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), dan Magnesium (Mg). Karakteristik pedologis ini menuntut manajemen input produksi yang sangat spesifik, terukur, dan berbiaya tinggi, di mana petani mutlak membutuhkan intervensi kapur pertanian dan pupuk dalam dosis yang presisi agar tanaman pangan dapat memproduksi secara optimal, (Hayati et al., 2025)

Di dalam lanskap ekologi tersebut, Desa Arang Limbung yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hadir sebagai salah satu episentrum pembangunan pertanian daerah. Desa ini hanya berjarak sekitar 15 kilometer dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan Kota Pontianak, menjadikannya wilayah penyangga strategis (*hinterland*) bagi



konstelasi rantai pasok pangan regional. Meskipun berstatus sebagai wilayah peri-urban, potensi agraris Desa Arang Limbung sangat komprehensif, mencakup budidaya tanaman pangan seperti padi dan jagung di lahan gambut, aneka sayuran hortikultura, ubi kayu, hingga sektor perkebunan seperti karet, kelapa, sawit, dan kakao. Pertanian di desa ini telah diwariskan lintas generasi, di mana sebagian besar proses budidaya masih dikelola melalui pendekatan konvensional yang mengandalkan kearifan lokal, serta banyak melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan (ibu-ibu) yang juga turut mengolah hasil panen mentah menjadi produk turunan pangan bernilai tambah.

Sebagai fokus studi yang esensial dalam menelaah efikasi kebijakan negara, penelitian ini memperkenalkan Kelompok Tani Puring Sari yang berkedudukan di wilayah administratif Desa Arang Limbung. Kelompok Tani Puring Sari, merupakan representasi otentik dari agregasi masyarakat petani gurem yang terus berupaya merajut eksistensi dan menjaga ketahanan pangan di tengah himpitan modernisasi serta kerentanan ekologis. Kelompok tani ini tercatat sebagai salah satu entitas legal penerima dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang berwujud alokasi pupuk bersubsidi, intervensi bantuan sarana produksi (saprodi), maupun penyuluhan agronomis. Namun, menjadi sebuah paradoks yang menarik untuk diteliti bahwa penerimaan berbagai fasilitas bantuan tersebut pada faktanya tidak serta-merta mengeliminasi kompleksitas persoalan kemiskinan struktural, inefisiensi produksi, dan asimetri informasi yang selama ini menjerat para anggotanya.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan urgensi yang tinggi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Puring Sari di Arang Limbung. Secara lebih spesifik dan terstruktur, penelitian ini berupaya untuk: (1) mengevaluasi manifestasi dampak positif dari kebijakan input subsidi hulu terhadap efisiensi biaya produksi; (2) mengidentifikasi dan membedah secara kritis ragam tantangan utamanya meliputi defisit adopsi teknologi mekanisasi, kelangkaan inklusi modal, kegagalan komunikasi birokrasi, ancaman krisis iklim dan banjir, serta hegemoni asimetri pasar oleh tengkulak; serta (3) merumuskan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah lintas sektoral (*cross-sectoral problem solving*) demi mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pedesaan.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang diuraikan dalam pendahuluan, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan ontologis dan epistemologis bahwa fenomena sosial dalam ranah sosio-ekonomi pertanian seperti relasi kuasa antara petani dengan tengkulak, kendala kultural dalam adopsi teknologi, serta persepsi subjektif masyarakat agraris terhadap instrumen kebijakan negara tidak dapat direduksi semata-mata menjadi variabel angka atau model statistik mekanistik. Metode kualitatif deskriptif memberikan fleksibilitas metodologis bagi peneliti untuk membedah, mengeksplorasi, memahami, dan memaknai dinamika struktural, proses interaksi sosial, serta realitas empiris yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (*helicopter view*) dan naturalistik.

Lokasi penelitian difokuskan secara spesifik dan terikat pada satu lokus (*single embedded case*), yakni di Kelompok Tani Puring Sari, yang secara administratif berkedudukan di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Penentuan lokasi ini tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan dilandasi oleh karakteristik purposif. Pertama, wilayah Arang Limbung merepresentasikan tipologi

agroekosistem lahan basah dan tanah gambut dalam yang sangat menantang untuk budidaya pertanian, namun sekaligus memiliki potensi pangan yang vital bagi ketahanan daerah. Kedua, posisi geografisnya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten dan provinsi menjadikan Kelompok Tani Puring Sari sebagai salah satu *locus* utama pelaksanaan berbagai program bantuan pertanian, penyuluhan, dan proyek mitigasi bencana dari pemerintah daerah dan pusat, sehingga menjadikannya prototipe ideal untuk mengukur transmisi kebijakan publik.

Instrumen pengumpulan data dalam studi ini bertumpu pada perolehan data primer yang digali langsung dari sumber aslinya di lapangan, guna memastikan otentisitas dan validitas temuan. Teknik utama yang diimplementasikan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Penentuan informan penelitian tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni proses pemilihan sampel sumber data berdasarkan kriteria dan pertimbangan kapabilitas spesifik, di mana informan dinilai sebagai pihak yang paling menguasai, mengalami, dan mengetahui informasi substansial yang dibutuhkan oleh peneliti. Terdapat tiga klasifikasi informan kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Ketua Kelompok Tani Puring Sari:** Diposisikan sebagai sumber data utama tingkat manajerial. Ketua kelompok memiliki otoritas historis dan administratif dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), mendistribusikan sarana produksi, serta memimpin advokasi kebutuhan anggota kelompok kepada instansi dinas pertanian terkait.
2. **Anggota Kelompok Tani:** Bertindak sebagai representasi aktor utama pelaku usaha tani di lapangan (*grassroots*). Wawancara dengan anggota bertujuan untuk memotret realitas fenomenologis tentang bagaimana mereka merasakan langsung dampak empiris baik manfaat positif maupun akses negatif dari implementasi kebijakan subsidi, fluktuasi harga komoditas pasca panen, jeratan rentenir, dan bencana hidrometeorologis.
3. **Kepala Desa Arang Limbung:** Bertindak sebagai representasi dari elemen pemerintahan tingkat desa yang memiliki pemahaman makro-demografi wilayah, regulasi desa, serta memahami peta koordinasi lintas instansi terkait upaya mitigasi infrastruktur dasar, seperti pengerukan dan normalisasi parit serta saluran air untuk menanggulangi banjir.

Sebagai bentuk triangulasi metode untuk memperkuat keabsahan data kualitatif, pengumpulan data primer melalui wawancara diperkuat dengan teknik observasi lapangan secara langsung (*direct field observation*). Observasi ini mencakup kegiatan mengamati kondisi faktual lahan budidaya pertanian gambut yang dikelola oleh Kelompok Tani Puring Sari, meninjau status, spesifikasi, dan kelayakan operasional dari inventaris Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang tersedia, serta melihat secara visual lanskap hidrologis dan jejak dampak limpasan genangan air (banjir) pada area pertanaman.

Seluruh data kualitatif yang terkumpul baik berupa transkrip wawancara, catatan lapangan (*field notes*), maupun dokumentasi visual kemudian diolah menggunakan teknik analisis data model interaktif. Tahapan ini mencakup proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus studi, penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel analitik, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) yang dilakukan secara deduktif-induktif guna menjawab tujuan penelitian secara komprehensif, objektif, dan akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis data dari wawancara mendalam dan observasi lapangan, analisis terhadap dinamika sosio-agronomi Kelompok Tani Puring Sari di Desa Arang Limbung menyingkap sebuah fenomena dualisme realitas kebijakan pertanian. Di satu sisi spektrum, terdapat capaian dan preseden positif dari intervensi subsidi sarana produksi negara yang secara

nyata mampu meringankan beban finansial para petani di fase awal penanaman. Namun, di sisi spektrum lainnya, terbangun suatu akumulasi hambatan struktural, inefisiensi manajerial, dan defisit fasilitas yang justru mendestruksi visi kemandirian, profitabilitas, dan kesejahteraan komunitas petani di fase budidaya hingga pascapanen.

#### **A. Dampak Positif: Efisiensi Biaya Produksi melalui Sarana Subsidi Tepat Sasaran**

Dalam struktur rantai pasok agribisnis, ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi di tingkat hulu (on-farm) merupakan determinan utama yang menentukan keberhasilan panen. Hal ini menjadi berlipat ganda urgensinya ketika dihadapkan pada konteks budidaya di lahan gambut seperti di wilayah Arang Limbung. Lahan gambut sejatinya memiliki kendala kesuburan tanah yang krusial, ditandai dengan rendahnya kapabilitas pengikatan hara, sifat kemasaman tanah yang dominan, serta ketiadaan hara makro esensial yang mencukupi untuk mendukung fase pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman secara optimal, (Hayati et al., 2025) Konsekuensi logis dari kondisi ekologis ini adalah ketergantungan absolut petani terhadap asupan pupuk kimia dan organik dalam dosis yang ekstensif, yang tentu saja berimplikasi pada meroketnya struktur biaya produksi.

Dalam merespons problematika hulu ini, intervensi kebijakan pemerintah melalui penyediaan sarana produksi pertanian tersubsidi terbukti memberikan daya ungkit ekonomi yang krusial bagi keberlangsungan usaha tani Kelompok Tani Puring Sari. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa bantuan alokasi pupuk bersubsidi yang mencakup jenis Urea, NPK, dan SP-36 yang secara regulasi telah memiliki jaminan mutu berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI), menjadi tulang punggung (*backbone*) kelangsungan proses bertani di wilayah ini, (MC KAB KUBU RAYA, 2024) Di samping pupuk, pemberian paket pestisida secara gratis oleh dinas terkait juga sangat membantu kelompok tani menekan biaya variabel operasional secara drastis, sehingga menyelamatkan arus kas (*cash flow*) para petani gurem yang umumnya memiliki likuiditas finansial yang sangat terbatas pada awal musim tanam, (Pekab Kubu Raya, 2021)

Standarisasi SNI pada produk pupuk bersubsidi memainkan peran teknis yang fundamental. Standar ini menjamin bahwa komposisi hara makro yang tertera pada kemasan benar-benar sesuai dengan kandungan aktualnya, sehingga petani terhindar dari maraknya peredaran pupuk palsu atau pupuk sub-standar yang sering kali merugikan produktivitas panen. Dengan aplikasi pupuk ber-SNI ini, produktivitas per hektar lahan gambut dapat terus dijaga dan didongkrak tanpa mengharuskan petani menebus pupuk komersial (non-subsidi) yang harganya di pasar bebas berfluktuasi tajam dan kerap kali melampaui daya beli masyarakat pedesaan.

Keberhasilan transmisi kebijakan pupuk dan pestisida ini tidak dapat dilepaskan dari peran vital dan fungsional institusi birokrasi di tingkat tapak, yakni kehadiran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Di wilayah Kabupaten Kubu Raya, mekanisme penyaluran sarana sarana produksi bersubsidi telah bertransformasi ke arah digitalisasi melalui integrasi dengan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), (Kurniawan & Widarti, 2021) Dalam konteks operasionalnya, PPL memegang mandat penting untuk melakukan tahapan pendataan, validasi luasan lahan, serta verifikasi kelayakan nama-nama petani penerima subsidi dengan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (KTP), (Utama, 2024) Wawancara dengan Ketua dan anggota Kelompok Tani Puring Sari secara empiris mengkonfirmasi bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui gerai kios resmi (Gapoktan) kini menjadi jauh lebih tertib, presisi, dan tepat sasaran berkat pendampingan administratif yang rigid dari PPL.

Lebih jauh, peran PPL tidak direduksi hanya sebagai administrator pembaruan data e-RDKK, melainkan secara aktif bertindak sebagai fasilitator transfer pengetahuan (*knowledge*

*transfer*). PPL secara berkala mengedukasi anggota kelompok tani mengenai kalibrasi dan kalkulasi dosis pemupukan yang presisi sesuai luasan bedengan, yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui oleh para petani yang hanya mengandalkan insting. Selain itu, pendampingan juga mencakup edukasi teknis tata cara pengaplikasian herbisida dan pestisida berbahan kimia yang tersertifikasi agar sesuai dengan ambang batas (pelatihan herbisida terbatas) sehingga tidak menimbulkan residu beracun yang persisten dan membahayakan keseimbangan tata air ekologi lahan gambut, (Raya, 2022) Kehadiran representasi negara dalam penyediaan input berstandar ini, secara konseptual, berhasil menciptakan jaring pengaman (*safety net*) awal yang mencegah petani Puring Sari dari ancaman kebangkrutan sebelum siklus panen dimulai.

Untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih presisi mengenai efektivitas kebijakan sarana produksi ini,

**Tabel 1 Mendemonstrasikan Perbandingan Empiris Kondisi Pra-intervensi dan Pasca-Intervensi pada Substistem Hulu Pertanian.**

No	Indikator Evaluasi Kebijakan Input Pertanian	Kondisi Asumsi Tanpa Subsidi (Mekanisme Pasar Bebas)	Kondisi Aktual dengan Intervensi Kebijakan (Puring Sari)	Implikasi Agroklimat & Ekonomi bagi Petani
1	<b>Pengadaan Pupuk Makro (Urea, NPK, SP-36)</b>	Harga komersial sangat fluktuatif, membebani struktur biaya, rentan terhadap penipuan pupuk abal-abal.	Harga dikontrol pemerintah (subsidi), kualitas terstandarisasi SNI, volume dihitung berdasarkan luas hamparan.	Penurunan beban biaya <i>overhead</i> , kepastian kualitas asupan unsur hara yang menyuburkan lahan gambut masam.
2	<b>Pengadaan Pestisida &amp; Edukasi</b>	Harus dibeli mandiri dengan harga ritel, risiko penggunaan dosis berlebih (resistensi hama).	Distribusi bantuan pestisida secara gratis, disertai pelatihan herbisida terbatas oleh PPL & instansi terkait.	Proteksi proaktif terhadap gagal panen ( <i>puso</i> ) akibat ledakan hama, menyetatkan kelestarian ekologis.
3	<b>Mekanisme Distribusi Sarana Produksi</b>	Rantai pasok panjang, dikuasai pedagang perantara, memicu disparitas ketersediaan barang.	Pendataan digital terpusat ( <i>bottom-up</i> ) melalui e-RDCK dan pemanfaatan integrasi KTP di kios resmi.	Realisasi penyaluran dijamin tepat sasaran, mengeliminasi kebocoran subsidi ke aktor perkebunan korporat.

## B. Kendala Utama: Kesenjangan Infrastruktur, Modal, Iklim, dan Pasar

### 1. Defisit Teknologi dan Usangnya Alat Pertanian Modern

Pilar utama modernisasi pertanian kontemporer bertumpu pada adopsi mekanisasi guna mereduksi rasio susut hasil (*yield loss*) pascapanen, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengkompensasi semakin menyusutnya ketersediaan tenaga kerja manual (buruh tani) di pedesaan, (Anggraini, 2025) Di beberapa kawasan lain di Kabupaten Kubu Raya, pemerintah melalui Dinas Pertanian telah sukses menyalurkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) canggih seperti traktor roda empat, *cultivator*, hingga mesin panen kombinasi (*combine harvester*) yang mampu memanen sekaligus merontokkan gabah dalam satu siklus pengerjaan, (Setiawan et al., 2025)

Ironisnya, realitas kepemilikan sarana prasarana yang ada di Kelompok Tani Puring Sari justru sangat memprihatinkan dan tertinggal jauh. Kelompok ini mengalami defisit alat pertanian modern yang bersifat kronis. Dari hasil observasi lapangan yang diverifikasi melalui wawancara mendalam, terungkap sebuah fakta bahwa kelompok tani ini hanya memiliki dan mengoperasikan 1 (satu) unit mesin perontok padi (*power thresher*) bermesin penggerak bensin berskala kecil. Lebih memprihatinkan lagi, mesin tunggal tersebut bukan merupakan fasilitasi program baru, melainkan inventaris usang peninggalan dari tiga periode rezim pemerintahan daerah sebelumnya. Alat yang secara mekanis sudah tidak

prima ini memiliki kapasitas pemrosesan yang sangat kecil, sehingga sama sekali tidak proporsional untuk melayani total akumulasi volume panen gabah dari seluruh hamparan lahan milik anggota kelompok

Keterbatasan fisik Alsintan ini menciptakan efek domino yang merugikan. Pada saat musim panen raya tiba secara serentak, terjadi antrian panjang inter-anggota dalam sistem peminjaman dan mobilisasi mesin perontok tersebut. Keterlambatan dalam proses perontokan (*threshing*) berdampak langsung pada penurunan kualitas mutu gabah; tumpukan bulir padi segar yang terlalu lama mengendap di lahan tanpa segera dirontokkan akan mengalami peningkatan kelembaban yang memicu pembusukan dini (berjamur), perubahan warna gabah, atau bahkan habis dikonsumsi oleh hama pengerat liar. Kerugian materiil akibat susut hasil pascapanen ini secara langsung menggerus persentase hasil panen yang dapat dijual ke pasar. Lebih jauh secara sosiologis, persistensi penggunaan teknologi manual yang menguras tenaga membuat sektor pertanian di Arang Limbung semakin kehilangan daya tariknya bagi generasi milenial, yang cenderung memilih migrasi untuk bekerja sebagai tenaga serabutan di pusat perdagangan Kota Pontianak atau menjadi buruh harian di korporasi perkebunan kelapa sawit sekitarnya.

## 2. Keterbatasan Akses Modal dan Ilusi Inklusi Keuangan Nasional

Pembiayaan atau modal awal merupakan urat nadi (*bloodline*) dalam keseluruhan siklus produksi pertanian. Dalam rangka memberantas ketergantungan kaum tani terhadap lintah darat, pemerintah pusat secara makro telah menginisiasi dan menggelontorkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, sebuah platform pinjaman perbankan yang disubsidi negara dengan suku bunga yang sangat rendah, (Endah Wahyuni, 2024) Di atas kertas, kebijakan ini diproyeksikan untuk mengakselerasi inklusi keuangan yang membebaskan petani gurem. Namun, temuan empiris pada Kelompok Tani Puring Sari membuktikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif ini menemui kebuntuan sistemik di level eksekusi.

Analisis terhadap narasi para petani menunjukkan bahwa akses mereka terhadap permodalan perbankan formal masih sangat teralienasi. Proses pencairan dana KUR dihadapkan pada hambatan prosedur administratif perbankan komersial yang dinilai terlalu berbelit, rumit, dan intimidatif bagi tingkat literasi masyarakat desa. Selain itu, rigiditas bank dalam menerapkan syarat agunan fisik atau kolateral (seperti kewajiban melampirkan sertifikat hak milik atas tanah) menjadi tembok penghalang yang absolut, mengingat lahan yang digarap petani sering kali berstatus hukum yang belum disertifikasi penuh, lahan sewa, atau berupa sistem bagi hasil (*mukhābarah* dan *muzāra'ah*) dengan tuan tanah lokal, (Rasiam, 2016)

Akibatnya, program inklusi keuangan melalui KUR hanya menjadi ilusi birokratis bagi kelompok ini. Untuk memenuhi tuntutan krusial pra-panen mulai dari membiayai penyewaan jasa traktor bajak tanah dari pihak luar, membayar upah harian buruh tanam, hingga memenuhi sandang-pangan keluarga selama masa tunggu panen anggota Puring Sari terpaksa kembali pada pola lama: menghabiskan tabungan pribadi yang teramat minim, atau yang terburuk, terjerumus dalam siklus hutang berbisa kepada rentenir kampung dan lembaga keuangan informal yang mematok suku bunga eksploitatif. Pinjaman berbunga tinggi ini berpotensi menciptakan kondisi kemiskinan persisten (*sunk cost* permanen). Ketika masa panen raya menghasilkan surplus ekonomi, seluruh profit yang diperoleh langsung terkuras secara instan hanya untuk melunasi cicilan pokok beserta bunga hutangnya, sehingga petani gagal mengakumulasi kapital guna mendanai modal mandiri pada siklus musim tanam berikutnya.

## 3. Hambatan Komunikasi Birokratis dengan Pemerintah Pusat

Keberhasilan tata kelola kebijakan pertanian yang bersifat partisipatif dan demokratis secara esensial mensyaratkan adanya saluran komunikasi dua arah yang lancar, transparan, dan tanpa hambatan antara entitas grassroots (petani) sebagai objek kebijakan dengan jajaran birokrasi di tingkat kementerian sebagai subjek perumus regulasi. Akan tetapi, dalam realitas sosio-politiknya, Kelompok Tani Puring Sari merasakan adanya jurang pemisah dan hambatan komunikasi struktural yang signifikan dengan otoritas pemangku kebijakan pusat. Hal ini mencapai titik klimaks pada suatu insiden di mana agenda pertemuan penting antara perwakilan kelompok tani dari wilayah tersebut dengan Menteri Pertanian yang telah diagendakan, secara tiba-tiba mengalami pembatalan sepihak.

Pembatalan komunikasi tingkat tinggi ini meskipun mungkin disebabkan oleh dinamika protokoler menciptakan efek kejut psikologis dan memperburuk asimetri informasi. Aspirasi-aspirasi faktual yang teramat krusial dan mendesak untuk diselesaikan mulai dari keluhan nyata mengenai parahnya kelangkaan inventaris Alsintan, sengketa status lahan gambut, indikasi peredaran oknum penipu pupuk subsidi, hingga tidak sinkronnya kalender pembagian benih dengan pergeseran musim hujan berakhir gagal tersampaikan secara langsung ke meja eksekutif pengambil keputusan. Ketika saluran (*channel*) advokasi vertikal menuju pusat terputus atau dipersulit oleh sekat birokrasi elit, para petani perlahan merasa teralienasi dan tidak dilibatkan dalam proses *co-creation* kebijakan. Dampak turunannya adalah mulai tumbuhnya bibit-bibit apatisisme komunal terhadap wacana-wacana program pembangunan pemerintah, karena mereka merasa bahwa regulasi yang diterbitkan sering kali bersifat *top-down* dan tuna-empati terhadap jeritan realitas di lapangan.

#### 4. Rentannya Ekologi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Banjir Tahunan

Kendala struktural berikutnya berakar pada faktor alam, di mana kondisi biofisik wilayah Arang Limbung yang didominasi hamparan gambut rawa rendah serta topografi yang dilewati oleh anak-anak sungai bermuara ke Sungai Kapuas, menjadikannya teritorial yang memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) sangat tinggi terhadap variabilitas iklim dan fenomena cuaca ekstrem. (Ramadhaningsih & Sampurno, 2017) Dinamika curah hujan yang memiliki intensitas tinggi secara persisten di Kalimantan Barat secara natural mengakibatkan peningkatan debit dan meluapnya air sungai secara eksponensial. Fenomena ini memicu bencana banjir musiman yang secara rutin menenggelamkan hamparan puluhan hektar lahan-lahan budidaya pertanian dan pemukiman di kawasan Kubu Raya, tidak terkecuali di Desa Arang Limbung, (Redaksi, 2025)

Daya rusak bencana banjir hidrometeorologis ini bersifat destruktif terhadap tanaman padi maupun palawija jagung. Lahan produktif yang terendam genangan air sehari-hari memicu kondisi hipoksia (kurang oksigen) pada tanah, yang secara biologis akan memicu pembusukan sistem perakaran, mematikan laju fotosintesis, dan bermuara pada deklarasi gagal panen massal secara fatalistik (*puso*). Patut diakui bahwa sebagai bentuk respons kehadiran negara, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bekerja sama secara sinergis dengan institusi Balai Wilayah Sungai (BWS) I Kalimantan di bawah supervisi Kepala Satker Fadiah dan peninjauan langsung Bupati Sujiwo telah berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi infrastruktur makro, seperti proyek normalisasi pengerukan parit primer, pembersihan gulma penyumbat, dan pembukaan saluran air hidrologis sekunder di titik-titik rawan genangan seperti Jalan Parit Bugis, Desa Arang Limbung.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa intervensi rekayasa infrastruktur skala makro ini sayangnya belum sepenuhnya diimbangi dengan perancangan mitigasi konkret pada level petak lahan usaha tani mikro. Hingga saat ini, pemerintah belum memfasilitasi pendirian infrastruktur pengendali sirkulasi muka air tanah lahan gambut (*canal*

*blocking/tabat*) dalam skala hamparan kelompok, pompa air portabel kapasitas besar untuk evakuasi genangan, maupun jaminan pemberian kompensasi benih varietas padi amfibi yang resisten terhadap kondisi tergenang secara sistematis bagi anggota Kelompok Tani Puring Sari. Ketiadaan asuransi pertanian yang tersosialisasi dengan baik (seperti program AUTP) dan ketidakmampuan memitigasi risiko iklim mikro ini menjadikan profesi bertani pangan di lahan gambut sebagai sektor perjudian dengan risiko finansial yang sangat tinggi (*high-risk exposure business*).

## 5. Ketidakstabilan Tata Niaga Pasar dan Hegemoni Struktur Tengkulak

Kegagalan terbesar dan paling mengancam eksistensi dalam keseluruhan hierarki bisnis agraris Kelompok Tani Puring Sari terjadi pada ujung fase hilir, yakni proses tata niaga pemasaran dan komersialisasi pascapanen. Berlakunya hukum dasar ekonomi (pasokan dan permintaan) pada saat kalender panen raya raya serentak tiba, memicu kondisi kelimpahan suplai gabah secara alamiah. Hal ini secara otomatis menekan anjloknya harga jual komoditas di tingkat basis produsen lokal. Tragisnya, harga jual yang terbentuk di pasar seringkali berada jauh di bawah titik impas (*break-even point*) dari akumulasi biaya produksi, pupuk, dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan oleh petani. Instrumen negara yang seharusnya bertindak sebagai jaring pengaman stabilitas, yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP), nyatanya gagal berfungsi secara efektif, di mana Perum Bulog sebagai institusi representasi *off-taker* (penyerap utama) negara terkesan lamban menyerap gabah akibat rigiditas standar mutu (*quality control*) seperti persyaratan persentase kadar air gabah yang sulit dipenuhi petani yang tidak memiliki rantai jemur berteknologi, (Rinaldi et al., 2024)

Vakumnya dan lemahnya ketegasan intervensi regulasi tata niaga pasar dari organ pemerintah ini segera dimanifestasikan menjadi peluang emas yang membuka ruang eksploitasi masif bagi para pedagang pengumpul atau *tengkulak*, (insidepontianak.com, 2025) Tengkulak beroperasi secara sistematis dengan memanfaatkan kondisi darurat kelemahan finansial petani. Memiliki struktur kapitalisasi modal yang kuat, para tengkulak ini sering kali memegang peran ganda (*dual-role*); mereka adalah pihak yang mendistribusikan pinjaman tunai di masa paceklik prapanen melalui sistem hutang berantai (skema *ijon*). Akibatnya, ketika panen tiba, anggota Kelompok Tani Puring Sari secara yuridis, moral, maupun finansial terikat kewajiban mutlak untuk menjual seluruh kuantitas hasil panennya secara eksklusif kepada sang tengkulak peminjam modal Dalam relasi monopsoni (pembeli tunggal) yang asimetris ini, harga beli didikte secara sepihak dan otoriter oleh tengkulak, mematok harga manipulatif yang jauh di bawah standar keekonomian wajar. Ketidakadilan transaksi ekonomi dan ketidakstabilan harga yang dilegalkan oleh kelalaian sistemik ini secara radikal mengikis motivasi kerja petani, merombak orientasi usaha tani yang semestinya ditujukan untuk akumulasi kapital (*profit-oriented*) menyusut menjadi sekadar alat menambal hutang untuk bertahan hidup (*subsistence-oriented*).

## C. Upaya Peningkatan dan Rekomendasi Pembaruan Strategis

Untuk memecah kebekuan dan mengurai benang kusut ketidakefektifan dari implementasi parsial kebijakan pemerintah saat ini, maka pendekatan tambal sulam (*ad-hoc*) tidak lagi relevan. Diperlukan sebuah rekayasa ulang yang radikal (*systemic re-engineering*) atas paradigma pembangunan pertanian di Desa Arang Limbung. Berbasis pada dialektika permasalahan di atas, rekomendasi strategis lintas dimensi berikut mendesak untuk segera diformulasikan dan dieksekusi oleh kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya:

### 1. Pemerataan Distribusi Bantuan dan Revitalisasi Inventaris Alsintan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus segera menginstruksikan audit komprehensif terkait rasio ketersediaan infrastruktur dan alat pascapanen di setiap satuan kelompok tani. Pengadaan, pembaruan, dan penambahan alokasi secara riil untuk alat pertanian modern mulai dari traktor spesifik lahan basah, *combine harvester*, hingga pengadaan beberapa unit mesin perontok padi portabel (*power thresher*) yang teknologinya didesain ringan untuk medan tanah gambut lunak merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditunda, (Agency, 2020; Rendra Oxtora, 2018) Politik tata ruang distribusi bantuan Alsintan tidak boleh lagi bersifat diskriminatif atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tani elit di kecamatan ring satu lingkaran pemerintahan, melainkan harus ditransformasikan menjadi distribusi merata yang sepenuhnya berazaskan pada metrik urgensi produktivitas, potensi geografi luasan lahan, dan urgensi kelompok.

### 2. Rekonstruksi Ekosistem Akses Modal melalui Afiriasi KUR Khusus Petani Pangan

Hambatan birokratis prosedur perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus segera direformasi dan dipangkas secara radikal. Pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah sangat direkomendasikan untuk menerbitkan regulasi kebijakan penjaminan kredit alternatif (*credit guarantee policy*) yang berfungsi untuk menyubstitusi syarat mutlak agunan kepemilikan aset fisik (sertifikat tanah/BPKB) menjadi skema agunan berbasis kelayakan proyek (*project feasibility*), asuransi gagal panen yang dilegalisasi negara, atau skema agunan resi gudang komoditas, (Gita Amanda, 2019) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama bank-bank BUMN/BUMD penyalur KUR wajib menerapkan pola pelayanan "jemput bola" (*door-to-door service*), dengan mendirikan posko pelayanan inklusi keuangan secara temporer di Balai Desa Arang Limbung. Langkah proaktif ini berfungsi untuk mendampingi literasi finansial petani, merealisasikan restrukturisasi utang konsumtif lama, dan membebaskan mereka sepenuhnya dari belenggu lintah darat.

### 3. Mendorong Kolaborasi Aktif dengan Sektor Swasta melalui Mekanisme "Tembakul" (CSR)

Dalam merespons keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dituntut cerdas dalam mengorkestrasi regulasi yang sesungguhnya telah diterbitkan, yakni implementasi nyata dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan Perkebunan Unggul Berbasis *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui sistem pangkalan data terintegrasi yang disebut "Tembakul", (Pemkab Kubu Raya, 2021) Kebijakan CSR dari belasan entitas perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala nasional yang mengeruk keuntungan beroperasi di wilayah administratif Kubu Raya tidak boleh sekadar bersifat santunan filantropi sesaat. Mereka harus ditekan dan diwajibkan secara hukum regulasi untuk mendedikasikan dan menyisihkan proporsi dananya (merujuk alokasi 25% dari pagu CSR korporasi) sebagai modal binaan pemberdayaan lintas sektor, khususnya bagi kelompok tani tanaman pangan *on-farm* seperti Puring Sari, (ANTARA News Agency, 2021) Wujud konkret dari kolaborasi swasta inter-sektor ini dapat ditransformasikan dalam format donasi penyediaan alat mesin pertanian canggih, pembangunan fasilitas lantai jemur gabah *indoor* bertenaga surya (UV dryer), atau investasi infrastruktur pengadaan rumah pompa air berkapasitas masif yang dialokasikan khusus guna menyedot genangan banjir di areal ekosistem pertanian gambut masyarakat, sehingga membentuk *win-win solution* ekosistem ketahanan daerah.

### 4. Reformasi Regulasi Penetapan Harga Dasar (HPP) dan Stabilisasi Tata Niaga Pasar

Guna mengeliminasi daya rusak dan memotong rantai hegemoni monopoli para tengkulak di tingkat hulu desa, pemerintah pusat dan Kementerian Perdagangan diwajibkan untuk merevisi anatomi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah agar indeksnya tidak stagnan, melainkan bersifat dinamis, responsif, dan dievaluasi menyesuaikan laju persentase inflasi biaya pokok sarana produksi pertanian modern dan komponen tarif upah buruh tanam. Selanjutnya, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai pilar stabilisator negara harus didekonstruksi instruksinya untuk menanggalkan paradigma birokratis pasif dan diwajibkan bertindak progresif sebagai *off-taker* murni. Bulog perlu menerapkan skema pembelian jemput bola secara proaktif pada musim panen raya, langsung mengerahkan armada transportasinya menembus sentra-sentra produksi kantong padi di titik lumbung desa, seperti di pedalaman Arang Limbung. Untuk memfasilitasi transaksi ini tanpa intervensi pihak ketiga, pemerintah daerah mendesak untuk merestrukturisasi dan menginjeksi permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arang Limbung untuk bermetamorfosis menjadi agregator ekonomi komunal atau lumbung pangan penyangga penyeteraan *margin* keuntungan. BUMDes akan mengumpulkan stok panen gabah dari anggota Puring Sari secara kolektif dengan harga minimal standar HPP, yang nantinya diresapkan ke platform serapan Bulog, menjamin proteksi kekayaan yang mengalir nyata kembali ke dompet para petani akar rumput.

Sebagai ikhtisar dari anatomi hambatan dan peta jalan rancangan solutif yang telah dijabarkan,

**Tabel 2 Mempresentasikan Kerangka Rekayasa Struktural bagi Penuntasan Problem Kelompok Tani Puring Sari.**

No	Aspek Dimensi Permasalahan Pertanian	Realitas Intervensi/Kondisi Saat Ini (Eksisting)	Rancangan Rekomendasi Strategis (Upaya Perbaikan Struktural)
1	Teknologi dan Fasilitas Alsintan	Defisit kronis. Hanya memiliki 1 (satu) unit mesin perontok padi power thresher kuno peninggalan 3 periode masa lampau, tidak proporsional dengan luas panen.	Pelaksanaan audit inventaris desa terpadu, penyaluran pengadaan baru berupa Power Thresher modifikasi rawa & Combine Harvester berbasis pemerataan kebutuhan produktivitas riil kelompok.
2	Akses Permodalan & Pembiayaan Finansial	Sosialisasi sentralistik perbankan yang elitis, syarat permohonan kolateral (jaminan aset) bersifat kaku dan birokratis berbelit.	Eksekusi regulasi penjaminan kredit afirmasi oleh Pemda, legalisasi skema resi gudang (komoditi jadi jaminan), pendirian posko KUR proaktif dan literasi di tingkat Balai Desa.
3	Ketahanan Bencana & Mitigasi Iklim	Respons pasif. Terbatas pada proyek normalisasi makro (saluran sekunder parit primer) oleh instansi pusat (BWS I), tanpa pelindung mikro pada level petak lahan.	Penyaluran infrastruktur spesifik mikro: bantuan instalasi pompa air irigasi portabel industri, sistem canal blocking, pemberlakuan massal Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), serta kompensasi benih hibrida resisten banjir.
4	Tata Niaga Pasar & Penjualan Komoditas	Ketiadaan lembaga <i>off-taker</i> andal; Petani terdesak dan berhadapan langsung dengan lintah darat (sistem monopsoni Ijon) akibat jeratan utang masa awal tanam.	Penegakan harga HPP yang dinamis terindeks inflasi sarana tani, serapan langsung dan modifikasi toleransi kualitas gabah oleh Bulog, serta optimalisasi fungsi bisnis lumbung pengumpul melalui BUMDes lokal.
5	Inisiatif Lintas Sektor Swasta	Eksplorasi ekosistem terpisah; korporasi sawit sekadar menjadi entitas di	Penerapan sanksi dan implementasi paksa Peraturan Bupati Kubu Raya No. 23/2021 (Sistem Tembakul),

wilayah tetangga tanpa ada kewajiban subsidi silang teknologi untuk pangan lokal.	mengikat 25% dana CSR perkebunan besar dialokasikan khusus guna subsidi teknologi infrastruktur tani pangan setempat.
---	---

## PENUTUP

Secara esensial, intervensi kebijakan pemerintah di sektor hulu telah memberikan dampak positif yang nyata bagi Kelompok Tani Puring Sari. Pemberian subsidi berupa kuota masif pupuk berstandar SNI dan pestisida gratis yang dikawal langsung oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terbukti sangat efektif dalam menekan tingginya biaya operasional. Langkah preventif ini berhasil menyelamatkan para petani akar rumput dari ancaman kebangkrutan dan gagal tanam, mengingat proses budidaya di lahan gambut memiliki kompleksitas pedologis dan kerentanan nutrisi yang sangat tinggi. Sayangnya, keberhasilan makroekonomi di tahap awal tersebut mengalami jalan buntu pragmatis dan gagal dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan petani di sektor hilir. Kegagalan ini disebabkan oleh defisit infrastruktur fisik, minimnya instrumen asuransi finansial, serta keterbatasan akses terhadap teknologi mekanisasi pascapanen yang modern. Situasi ini diperparah oleh ancaman anomali cuaca ekstrem dan banjir tahunan di lahan gambut yang tidak diimbangi dengan instalasi teknologi peredam hidrologis yang memadai di tingkat mikro.

Krisis di lapangan ini semakin mencekik akibat diskriminasi akses permodalan dari perbankan resmi, seperti sulitnya pencairan dana KUR karena hambatan agunan. Kebuntuan finansial ini secara tragis memaksa para petani kecil terjatuh dalam lingkaran eksploitasi tengkulak lokal pencetus modal. Akibatnya, pada puncak musim panen raya, para mafia tengkulak ini dengan sewenang-wenang memonopoli penentuan harga jual gabah, sebuah penderitaan yang terus lestari akibat absennya penegakan regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berkeadilan di pasaran. Sebagai solusi pamungkas, pemerintah harus menghilangkan ego sektoral dan mewajibkan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan perusahaan perkebunan swasta di wilayah tersebut. Kewajiban CSR perusahaan tidak boleh lagi sekadar donasi amal, melainkan harus dipaksa secara hukum untuk mendanai transfer teknologi pertanian, membangun infrastruktur hidrologis tata air, dan membuka akses pasar langsung. Hanya melalui sinergi multidimensional yang mengintegrasikan subsidi pemerintah, kemudahan kredit bank, dukungan CSR swasta, dan regulasi proteksi harga, para petani dapat benar-benar merdeka dari jerat kemiskinan dan memimpin terwujudnya kedaulatan swasembada pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suryana, Sudi Mardianto, Erma Suryani, & Sumedi (Eds.). (2021). *REDESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995—2021*. PT Penerbit IPB Press.
- Agency, A. N. (2020). *29 Gapoktan di Kubu Raya terima bantuan Alsintan*. ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/437670/29-gapoktan-di-kubu-raya-terima-bantuan-alsintan>
- Anggraini, R. (2025). PENANGANAN PANEN DAN PASCA PANEN PADI DI DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA. *Agrofood*, 7(1), 26–34. <https://doi.org/10.63848/agf.v07n1.3>
- ANTARA News Agency. (2021). *Kubu Raya gandeng perusahaan untuk bangun pertanian masyarakat*. ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/473958/kubu-raya-gandeng-perusahaan-untuk-bangun-pertanian-masyarakat>



- Endah Wahyuni. (2024). Prabowo Hapus Utang UMKM Pertanian hingga Peternakan. *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)*. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/prabowo-hapus-utang-umkm-pertanian-hingga-peternakan/>
- Gita Amanda. (2019, November 12). *Mentan Sebut Akses Petani Terhadap KUR Masih Banyak Kendala*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/q0uthe423>
- Hariyoko, Y. (2013). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(10). <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/313>
- Hayati, R., Junaidi, J., Alhaddad, A. M., & Gafur, S. (2025). PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI JAGUNG LAHAN GAMBUT DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 10(4), 436–442. <https://doi.org/10.20956/jdp.v10i4.32571>
- Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>
- insidepontianak.com. (2025). *Petani di Pelosok Kubu Raya Terjepit Tengkulak, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan*. HarianBerkat. <https://insidepontianak.com/article/39825/petani-di-pelosok-kubu-raya-terjepit-tengkulak-dprd-minta-pemerintah-turun-tangan>
- Kurniawan, H. M., & Widarti, S. (2021). Sosialisasi E-RDKK Pupuk Bersubsidi Pada Kelompok Tani Di WKPP Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 1(1), 30–39. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jpkmm/article/view/284>
- MC KAB KUBU RAYA. (2024). *InfoPublik—Pemkab Kubu Raya-Pemprov Kalbar Siapkan Aplikasi Pupuk bersubsidi*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/839671/index.html>
- Pemkab Kubu Raya. (2021). *Kubu Raya gandeng perusahaan untuk bangun pertanian masyarakat*. <https://www.kuburaya.go.id/seputar-kuburaya/berita/kubu-raya-gandeng-perusahaan-untuk-bangun-pertanian-masyarakat>
- Pemkab Kubu Raya. (2021). *Upayakan Penuhi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi*. <https://www.kuburaya.go.id/seputar-kuburaya/berita/upayakan-penuhi-kebutuhan-pupuk-bersubsidi>
- Ramadhaningsih, L., & Sampurno, J. (2017). Identifikasi Struktur Lapisan Bawah Permukaan Lahan Gambut di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Metode Resistivitas Konfigurasi Dipole-Dipole. *Physics Communication*, 1(2), 29–35. <https://doi.org/10.15294/physcomm.v1i2.10869>
- Rasiam, R. (2016). RELASI SOSIO-EKONOMI PETANI DENGAN PEMILIK LAHAN MELALUI KONSEP MUKHĀBARAH DAN MUZĀRA‘AH DI DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA. *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 425. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.418>
- Raya, P. K. (2022). *Kurangi Dampak Pestisida, Ratusan Petani Kubu Raya Ikut Palatihan Herbisida Terbatas*. <https://www.kuburaya.go.id/seputar-kuburaya/berita/kurangi-dampak-pestisida-ratusan-petani-kubu-raya-ikut-palatihan-herbisida-terbatas>
- Redaksi. (2025, May 17). Cegah Banjir, Pemkab Kubu Raya dan BWS I Kalimantan Normalisasi Saluran Air di Arang Limbung. *SUARAKALBAR.CO.ID*.



- <https://www.suarakalbar.co.id/2025/05/cegah-banjir-pemkab-kubu-roya-dan-bws-i-kalimantan-normalisasi-saluran-air-di-arang-limbung/>
- Rendra Oxtora. (2018). *Kubu Raya terima bantuan alsintan modern*. ANTARA News Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/362099/kubu-roya-terima-bantuan-alsintan-modern>
- Rinaldi, H., Sasongko, A. E. T., & Jaya, M. (2024). PERTANIAN PADI, DILEMA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA. *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS*, 5(1), 61–71. <https://doi.org/10.38062/jpab.v5i1.745>
- Safitri, M. G., Agustin, M., Syahroni, I., & Kurniati, E. (2025). Peran Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 195–204. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1158>
- Setiawan, B., Fahrizal, I., Suhendra, S., Anjiu, L. D., Nopriandy, F., & Kurniawan, K. (2025). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI MESIN PERONTOK PADI UNTUK PETANI DI DUSUN TUMPUN HATI DESA BENTUNAI. *DIPAMAS*, 7(2), 29–38. <https://doi.org/10.47767/dipamas.v7i2.1087>
- Utama, A. (2024, January 5). *Menggembirakan PPL dan Petani, Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Sesuai Kebutuhan*. <https://psp.pertanian.go.id/berita/menggembirakan-ppl-dan-petani-tambahan-anggaran-pupuk-subsidi-sesuai-kebutuhan>

